



Pendidikan Politik oleh Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kerinci

Windy Rahayu, Al Rafni

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang, Indonesia

* windyrahayu46@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 26th February 2023

Revised 17th August 2023

Accepted 6th Sept 2023

Keywords:

Political Education

Political Party

Partai Keadilan Sejahtera

Kerinci Regency

ABSTRACT

This article seeks to elucidate the execution of political education by the Regional Representation Council of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in Kerinci Regency. The research methodology employed herein is descriptive qualitative in nature. The selection of informants utilized a purposive sampling technique. Data acquisition encompassed interviews and documentation studies. The validation of data employed a source triangulation technique. Data analysis involved reduction, presentation, and drawing conclusions. The findings revealed that PKS in Kerinci Regency executed political education both internally and externally. Their programs comprised various activities such as training, mentoring, seminars, socialization, and community service. Notably, PKS's political education encompassed not only political facets but also religious content, exemplified by activities like 'halaqoh' study sessions—an aspect integral to PKS as a da'wah party. Within their political education initiatives, the Regional Representation Council of PKS in Kerinci Regency has systematically structured a cadreization curriculum. Key factors supporting these educational endeavors encompass human resources, funding, facilities, and information, which are crucial considerations for the party to ensure smooth implementation. This study is limited to the PKS in Kerinci Regency. The further study should see the implementation of PKS in Indonesia and other Islam ideology in party and civil society organization.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Windy Rahayu

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Windyrahayu46@gmail.com

PENDAHULUAN

Warga negara yang baik adalah individu yang menyadari hak dan kewajibannya melalui sistem penyaluran aspirasi secara formal. Untuk mampu melaksanakan hal tersebut, warga negara membutuhkan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun informal dengan tujuan membentuk kepribadian politik setiap warga negaranya. Hal ini dibutuhkan untuk menumbuhkan kemampuan mereka dalam berpartisipasi politik (Handoyo, 2017). Selain itu, pendidikan politik adalah usaha yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan manusia politik yang kritis (Rafni, 2023).

Konsep dasar lainnya terkait dengan pendidikan politik adalah proses yang mengajarkan warga negara tentang nilai, norma, dan simbol politik melalui saluran berupa sekolah, pemerintah, organisasi sosial, dan partai politik. Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi kedudukan, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sukmawati, 2020).

Pendidikan politik juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan masyarakat melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya (Nurdiansyah, 2020). Selain itu, literatur lainnya mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah proses metodologis penanaman cita-cita politik, norma, nilai, dan sistem aturan politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses kesadaran politik dalam membentuk proses normatif nilai-nilai etis yang rasional dan dialogis (Rafni, 2020). Pendidikan politik bagi generasi muda merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses pembangunan nasional sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab bersama (Fredy, 2022).

Partai politik memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011 dalam Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa: partai politik menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab dengan menjaga keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan lain-lain : (a) meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik dan prakarsa masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Rafni, 2019). Partai politik juga dilihat sebagai sarana pendidikan demokrasi agar masyarakat dapat menentukan pilihan politik secara cerdas dan menjamin kualitas hasil pemilu (Sahira, 2019).

Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa fungsi partai politik menjadi sarana pendidikan bagi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, partai politik berhak mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Masriyani, 2020).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai dakwah yang mengusung ideologi Islam sebagai sistem keyakinan yang diterjemahkan ke dalam kehidupan politik. Ideologi yang diusung oleh PKS merupakan visi yang utuh dan luas yang dirumuskan untuk mencapai tujuan (Nurussa'adah, 2017). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS di Kabupaten Kerinci telah melakukan pendidikan politik secara terstruktur. Pendidikan politik yang dilakukan PKS memiliki ciri khusus yaitu terletak pada pendidikan politik yang diberikan tidak hanya berorientasi pada muatan politik, tetapi juga pada

Windy Rahayu. Al Rafni. *Pendidikan Politik oleh Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kerinci*

materi keagamaan. PKS juga merupakan partai yang terkenal di Kabupaten Kerinci karena telah banyak melahirkan kader-kader yang militan dan banyak melakukan kegiatan sosial.

DPD PKS di wilayah lain, seperti di Jawa Barat dan Kalimantan Barat juga melakukan pendidikan politik (Rianto, 2019; Wibowo, 2021). Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti seminar, pengajian rutin untuk kader, dan kajian-kajian umum untuk pemilih. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan politik juga dilakukan melalui media sosial, media pribadi, media cetak maupun elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat implementasi pendidikan politik yang dilakukan DPD PKS di Kabupaten Kerinci. Hal ini disebabkan banyaknya kader-kader PKS yang tergolong militan dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pendidikan politik partai tersebut. Bagaimana implementasi pendidikan politik tersebut dilakukan? Pertanyaan ini akan dibahas dalam artikel ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana DPD PKS Kabupaten Kerinci dalam hal mencetak kader yang memiliki loyalitas, semangat militansi, kemandirian dan membangun tatanan pemerintahan yang baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan politik oleh PKS di Kabupaten Kerinci. Kabupaten ini terletak di Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 235.735 jiwa. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengeksplorasi masalah manusia secara sosial. Peneliti kemudian membangun gambaran yang kompleks dan holistik, analisis kata-kata dan melaporkan pandangan rinci tentang informan (Cresswell, 2016). Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengungkapkan secara jelas mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Informan dalam penelitian ini yaitu pengurus DPD PKS dan masyarakat Kabupaten Kerinci. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui bagaimana bentuk kurikulum pendidikan politik, pelaksanaan pendidikan politik serta faktor pendukung pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD PKS di Kabupaten Kerinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum pendidikan politik tidak hanya menanamkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi berisi tentang bagaimana berperilaku politik yang disertai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan politik merupakan proses pewarisan dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat kepada setiap individu. Kurikulum pendidikan politik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) nilai, tujuan, etika dasar dan target yang dicapai yang dapat diterima oleh semua jenis dan golongan masyarakat, (2) nilai-nilai tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan informasi, pengetahuan teoritis maupun hal-hal yang bersifat informatif dan kognitif, (3) memuat seperangkat pengetahuan praktis (Apple, 2014).

DPD PKS Kabupaten Kerinci melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan Kurikulum Kaderisasi Partai (KKP). KKP dilakukan selama enam bulan yang disusun langsung oleh DPP PKS. Dalam periode tersebut terdapat 24 kali pertemuan Unit Pembinaan Anggota (UPA) dan enam kali kegiatan webinar online dan pelatihan offline sesuai kondisi yang ada. Pendidikan ini dilaksanakan oleh bidang

Windy Rahayu. Al Rafni. *Pendidikan Politik oleh Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kerinci*

kaderisasi yang terdiri dari Pelatihan Peningkatan Spritual (PPS), Pelatihan Peningkatan Wawasan (PPW) dan Pelatihan Kepemimpinan Kewirausahaan (PKK). Melalui adanya KKP yang terstruktur dan sistematis ini diharapkan akan terbentuknya militansi kader DPD PKS yang baik.

Pendidikan politik DPD PKS terimplementasi dalam program partai yang diwujudkan secara internal dan eksternal oleh partai. Tidak hanya bermuatan politik tetapi juga mengandung materi keagamaan yang tidak lepas dari karakteristik PKS sebagai partai dakwah, seperti: *halaqoh* dan kegiatan sosial lainnya. PKS merupakan partai yang terinspirasi oleh model dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada tahap awal terbentuknya, partai ini banyak memfokuskan agenda terkait Islam sebagai sistem, ideologi, dan landasan penyelenggaraan pemerintahan nasional. PKS pertama kali tampil pada pemilu pada tahun 1999 dan mengangkat isu pokok yang diperjuangkan seputar penerapan syariat Islam, syariat Islam, dan berdirinya negara Islam.

Berdasarkan informan dari pengurus DPD PKS, pada pemilu tahun 2004, PKS banyak mengembangkan isu seperti: menolak korupsi, *good governance*, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi. PKS juga menyentuh permasalahan umat dan membuat program-program yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Hal ini menjadi strategi utama oleh DPD PKS dalam menarik perhatian pemilih.

Informan lainnya juga menyatakan bahwa DPD PKS menggunakan poros (*mihwar*) untuk meraup calon-calon kader yaitu secara kolektif (*jama'i*). Pendekatan lainnya dilakukan melalui orang per orang, meliputi komunikasi secara langsung (*fardhi*). Setelah itu calon kader diajak untuk mengikuti agenda dan forum-forum yang telah diorganisir oleh PKS yang disebut dengan *tarbiyah*. *Tarbiyah* memiliki beberapa sarana seperti *liqo/halaqah* (pertemuan rutin mingguan), *ta'lim* dan *tatsqif* (pembekalan intelektual Islam), *dauroh* (pelatihan), *mukharyam* (perkemahan), *mabit* (malam bina iman dan taqwa) dan *rihlah* (rekreasi).

Selain agenda tersebut, PKS sendiri memiliki kurikulum sendiri dalam membentuk watak dan karakter para kadernya yang disebut dengan *manhaj tarbiyah*. Faktor penentu dalam hal pengkaderan adalah aktifnya kader dalam lingkaran tarbiyah, loyalitasnya terhadap agenda-agenda yang diadakan oleh partai. Kader dituntut untuk memperlihatkan kesabaran (*tawadhu*) agar mereka dapat menjadi kader tingkat inti dan memegang jabatan fungsional baik di instansi negara maupun partai.

Pendidikan politik ini dapat terlaksana dengan adanya faktor pendukung yaitu: sumber daya. Sumber daya ialah kemampuan pikiran dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh individu. Sumber daya bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Sumber daya mencakup beberapa hal, yaitu: (a) Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu penggerak utama kelancaran suatu kegiatan. (b) Pendanaan. Sumber pendanaan pendidikan politik berasal dari dana partai. Dana tersebut diperoleh dari APBN, APBD serta iuran internal anggota partai. (c) Fasilitas, termasuk di dalamnya penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan acara. (d) Data dan informasi. Dengan adanya data dan informasi akan terjalin komunikasi yang baik antara partai dan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaan pendidikan politik ini terdapat kendala-kendala, diantaranya: (a) keterbatasan fasilitas, seperti tempat dan sarana untuk menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Kerinci yang masih terbatas, (b) sulitnya mengakses dana yang tersedia melalui APBN dan APBD yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan politik, (c) kurangnya komunikasi antara DPC dan DPR, yang menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat, (d) kurangnya kader partai yang dapat berperan sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan pendidikan politik, (e) persepsi negatif dari masyarakat terhadap partai politik yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik, DPD PKS Kabupaten Kerinci memiliki KKP yang disusun secara sistematis. Kegiatan pelatihan kader dilakukan melalui: Pelatihan Peningkatan Kerohanian, Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Pelatihan Kepemimpinan Wirausaha. Pelaksanaannya ditentukan secara terjadwal dan rutin sehingga terbentuk militansi kader yang baik.

Selain itu, pelaksanaan pendidikan politik juga menggunakan strategi program kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian, sosialisasi dan kegiatan bakti sosial. Beberapa kegiatan yang menjadi ciri PKS mencakup: *liqo/halaqah* (pertemuan rutin mingguan), *ta'lim* dan *tatsqif* (pembekalan intelektual Islam), *dauroh* (pelatihan), *mukhayyam* (perkemahan), *mabit* (malam bina iman dan taqwa) dan *rihlah* (rekreasi). PKS juga memiliki dewan syariah yang berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan partai.

Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan politik DPD PKS di Kabupaten Kerinci, mencakup: adanya sumber daya manusia yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan politik, pendanaan, sarana dan prasarana serta data dan informasi. Semuanya membantu dalam kelancaran pelaksanaan program pendidikan politik bagi anggota internal partai dan juga bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala, seperti: sulitnya mengakses pendanaan dan kurang antusiasnya masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD PKS disebabkan oleh citra negatif partai politik. Penelitian lebih lanjut terkait hal ini perlu dilakukan agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap pendidikan politik yang dilakukan oleh partai di Indonesia.

REFERENSI

- Apple, M. W. (2014). *Official knowledge: Democratic education in a conservative age*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Erfina Nurussa'adah. (2018). Nilai Keterbukaan Ideologi Partai Islam Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 5.
- Fredy, M. T., Rafni, A., Suryanef, S., & Irwan, I. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMAN 4 Kerinci melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Journal of Civic Education*, 5(2), 140-149.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 134.
- Masriyani, Herma Yanti. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Memberi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Jurnal Wajah Huku*. Volume 3. Nomor 1 (97-109).
- Nurdiansyah, E. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, volume 2. Nomor (1), 54–58.
- Nurussa'adah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43-52.

Windy Rahayu. Al Rafni. *Pendidikan Politik oleh Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kerinci*

Rafni, A., & Suryanef, S. (2019). The Development Of Election Smart House As A Tool Of Political Education Based On Local Wisdom. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(1), 69-77.

Rafni, A. (2020). Political Education for Novice Voters Through Students' Democracy Jamboree Program. In *International Conference on Social Studies, Globalisation and Technology (ICSSGT 2019)* (pp. 115-123). Atlantis Press.

Rafni, A., & Suryanef, S. (2023). Preparing Quality Millennial Generation Through Anticipating Political Education. In *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 748-757). Atlantis Press.

Rianto, H., & Rohani, R. (2019). Peranan PKS Dalam Memberikan Pendidikan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018. *Untirta Civic Education Journal*, 4(2).

Sahira, E. I. (2019). Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2), 76-80.

Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(2), 191-199.

Wibowo, A. P., & Darmawan, C. (2021). Peran Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wahana Pendidikan Politik guna Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(01), 1-9.